

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016 – 2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan)

Zakaria Anshori

Program Studi Akuntansi Universitas Islam Lamongan

Email: anshori.zakaria@yahoo.co.id

ABSTRAK

Studi ini dilakukan di BPKAD Kab. Lamongan yang terletak di Jl. Basuki Rahmat no. 02 Lamongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 – 2018 melalui BPKAD. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, tinjauan kepustakaan, serta mengakses web dan situs-situs terkait. Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan Pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam merealisasikan PAD dan pajak daerah tergolong efisien, karena dengan biaya yang relatif sedikit Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun demikian tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Kata kunci: Pemerintah daerah, kinerja keuangan, analisis rasio.

ABSTRACT

This study was conducted in BPKAD Kab. Lamongan is located at Jl. Basuki Rahmat no. 02 Lamongan. The purpose of this study was to determine the financial performance Lamongan District Government fiscal year 2016 - 2018 through BPKAD. This type of research is quantitative descriptive. The data in this research is financial statements include the Balance Sheet, Budget Realization Report, Cash Flow, and CaLK. Data collection techniques used were interviews, documentation, review of literature, as well as accessing the web and related sites. The data analysis used is quantitative descriptive method using the ratio of local government finances. Based on the results of the study it can be concluded that in realizing PAD and regional taxes classified as efficient, because with relatively little cost the Lamongan Regency Government can realize PAD and regional tax revenues. However, the degree of decentralization, dependency, independence of financial performance in Lamongan Regency is very low so that in its government activities it still depends on the Central and Provincial Governments.

Keywords: Local governments, financial performance, ratio analysis.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Daerah Tingkat Kabupaten diberi Nomor 22 Tahun 1999 tentang kewenangan yang luas dalam Pemerintahan Daerah, Pemerintah menyelenggarakan semua urusan

pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah harus mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengelola keuangan daerah membentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah

pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan yang digunakan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dengan menganalisis laporan keuangan dari pemerintah daerah akan dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Selain itu, dengan telah dianalisisnya laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan kinerja keuangan pada tahun selanjutnya dapat lebih baik sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan sebagai batasan penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 –

2018 melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ?

Menurut Soelistijono Boedi (2012) mengartikan tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Mahmudi dalam Nordiawan dan Hertianti (2010: 158-160) tujuan penilaian kinerja di sektor publik antara lain untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), memotivasi pegawai, menciptakan akuntabilitas publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Mahmudi (2007: 4) Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit –LRA, Pembiayaan dan SiLPA/SiKPA (b) Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (c) Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris (d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bentuk

dari pengungkapan (disclosure) oleh pemerintah daerah.

Menurut Warsidi dan Bambang dalam Fahmi (2012: 45) mengartikan analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa laluan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain (Mahmudi, 2007: 128-132):

1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan

Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah ini menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan / atau pemerintah provinsi. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan / atau pemerintah provinsi.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Widodo dalam Halim dan Kusufi, 2013: L-5). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan

semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah.

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio efektivitas PAD

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

b. Rasio efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Widodo dalam Halim dan Kusufi, 2013: L-6). Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari

100% (semakin kecil nilai rasio ini semakin baik).

5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

a. Rasio efektivitas pajak daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

b. Rasio efisiensi pajak daerah

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

6. Rasio Efisiensi Belanja

Mahmudi (2007: 152) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

7. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Rasio DSCR sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. DSCR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah.

8. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan negatif maka hal itu

menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.

9. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasannya kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, penyesuaian faktor makro ekonomi dan lain-lain.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 – 2018 melalui BPKAD.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan di BPKAD Kab. Lamongan yang terletak di Jl. Basuki Rahmat no. 02 Lamongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 – 2018 melalui BPKAD.

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif. Data dalam

penelitian ini adalah laporan keuangan antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, tinjauan kepustakaan, serta mengakses web dan situs-situs terkait. Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan Pemerintah daerah.

Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi

$$\begin{aligned} & \text{Derajat Desentralisasi} \\ & = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \end{aligned}$$

Sumber: Mahmudi (2007: 128)

Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Adapun kriteria untuk menetapkan Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria penilaian tingkat Derajat Desentralisasi

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Derajat Desentralisasi
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Degdagri – Fisipol UGM dalam Bisma dan Susanto (2010).

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Ketergantungan} \\ & = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \end{aligned}$$

Sumber: Mahmudi (2007: 128)

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi.

Adapun kriteria untuk menetapkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Degdagri – Fisipol UGM dalam Bisma dan Susanto (2010).

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Sumber: Mahmudi (2007: 128)

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Berikut kriteria untuk menetapkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3. Kriteria penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth dalam Puspitasari (2012).

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1) Rasio efektivitas PAD

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Efektivitas PAD} \\ &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \end{aligned}$$

Sumber: Mahmudi (2007: 129)

Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik.

2) Rasio efisiensi PAD

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Efisiensi PAD} \\ &= \frac{\text{Biaya untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \end{aligned}$$

Sumber: Mahmudi (2007: 129)

Dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil nilai rasio ini semakin baik).

5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

1) Rasio efektivitas pajak daerah

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas Pajak Daerah} \\ &= \frac{\text{Realisasi Pajak daerah}}{\text{Target Pajak daerah}} \end{aligned}$$

Sumber: Mahmudi (2007: 129)

Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik.

2) Rasio efisiensi pajak daerah

Efisiensi Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}}$$

Sumber: Mahmudi (2007: 130)

Dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

6. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2007: 152)

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Semakin rendah nilai rasio maka semakin baik.

7. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$= \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan tahun } t-1}{\text{Pendapatan tahun } t-1}$$

Sumber: Mahmudi (2007: 128)

Keterangan :

 $Tahun_t$ = Tahun yang dihitung $Tahun_{t-1}$ = Tahun sebelumnya

8. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1}$$

Sumber: Mahmudi (2007: 146)

Keterangan :

 $Tahun_t$ = Tahun yang dihitung $Tahun_{t-1}$ = Tahun sebelumnya

PEMBAHASAN

Tabel 4. Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3*100
2016	403.474.462.147,33	2.719.031.205.756,84	14,84
2017	429.200.063.876,82	2.716.042.671.044,82	15,80
2018	436.595.179.671,02	2.811.062.543.333,02	15,53
Rata-rata	1.269.269.705.695,17	8.246.136.420.134,68	15,39

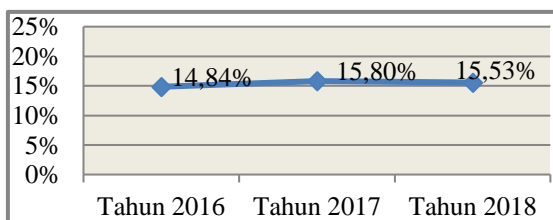
Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019.

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018.

Derajat desentralisasi sebesar 15,39% mengandung arti bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya 15,39% dari Total Pendapatan Daerah, sehingga PAD kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2016 – 2018 *kurang* berkontribusi terhadap Total Pendapatan Daerahnya (Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM dalam Bisma dan Susanto, 2010). Hal itu disebabkan masih tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi terutama Dana Alokasi Umum (DAK).

Berikut ini grafik yang menunjukkan trend rasio Derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 sampai

dengan tahun 2018.



Gambar 1. Grafik Trend Rasio

Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 mengalami trend fluktuatif. Dimulai dari tahun anggaran 2016 dimana persentasenya adalah 14,84% yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2017 menjadi 15,80% namun turun pada tahun anggaran 2018 menjadi 15,53%. Penurunan tersebut dikarenakan kenaikan total Pendapatan Daerah tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah PAD yang terealisasi. Pada tahun 2016 Pemerintah daerah kabupaten Lamongan mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp403.474.462.147,33. Sedangkan pada tahun 2017 PAD Pemerintah daerah kabupaten Lamongan mengalami kenaikan sebesar Rp429.200.063.876,82 atau 6,38% dari tahun sebelumnya dan tahun 2018 naik sebesar Rp436.595.179.671,02 atau 1,72% dari tahun sebelumnya. Kenaikan PAD tahun 2018 tidak diimbangi dengan

kenaikan Pendapatan Daerah yang mengalami kenaikan sebesar 3,50%.

Tabel 5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3*100
2016	1.845.437.048.941,00	2.719.031.205.756,84	67,87
2017	1.759.224.311.168,00	2.716.042.671.044,82	64,77
2018	1.862.466.562.171,00	2.811.062.543.333,02	66,25
Rata-rata	5.467.127.922.280,00	8.246.136.420.134,68	66,30

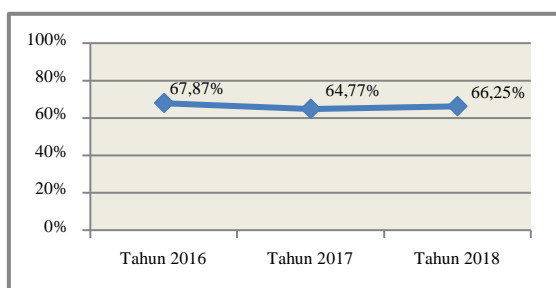
Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019.

Perhitungan rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018.

Pada tahun anggaran 2016-2018 Kabupaten Lamongan memiliki rata-rata Pendapatan Transfer sebesar Rp5.467.127.922.280,00 diantaranya pada tahun 2016 sebesar Rp1.845.437.048.941,00 tahun 2017 sebesar Rp1.759.224.311.168,00 dan tahun 2018 sebesar Rp1.862.466.562.171,00. Sedangkan untuk Total Pendapatan Daerah rata-rata menerima sebesar Rp8.246.136.420.134,68 diantaranya pada tahun 2016 sebesar Rp2.719.031.205.756,84 tahun 2017 sebesar Rp2.716.042.671.044,82 dan

tahun 2018 sebesar Rp2.811.062.543.333,02. Sehingga dapat dijelaskan bahwa dari total Pendapatan Daerah yang diterima Kabupaten Lamongan sebagian besar bersumber dari Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan dan lainnya serta transfer Provinsi seperti Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya. Oleh karena itu Kabupaten Lamongan dalam memperoleh pendapatan daerahnya sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi sehingga tingkat ketergantungan Kabupaten Lamongan terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi *sangat tinggi* (Tim Litbang Degdagri – Fisipol UGM dalam Bisma dan Susanto, 2010).

Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan

Rasio ketergantungan keuangan Pemerintah daerah kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi mengalami trend fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 67,87%, kemudian naik sebesar 64,77% di tahun 2017, dan turun pada tahun 2018 sebesar 66,25%.

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Transfer + Pinjaman (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3*100
2016	403.474.462.147,33	1.845.437.048.941,00	21,86
2017	429.200.063.876,82	1.759.224.311.168,00	24,40
2018	436.595.179.671,02	1.862.466.562.171,00	23,44
Rata-rata	1.269.269.705.695,17	5.467.127.922.280,00	23,22

Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019.

Perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018.

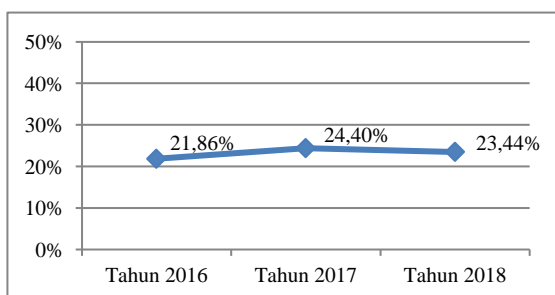
Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 memiliki rata-rata rasio kemandirian sebesar 23,22%.

Menurut Paul dan Kenneth dalam Puspitasari (2012) rasio sebesar 23,22% dapat artikan bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan tergolong *rendah sekali* dan berpola *Instruktif*. Pola hubungan instruktif yaitu peranan

pemerintah pusat atau provinsi lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah kabupaten Lamongan yang rendah sekali tersebut disebabkan ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berupa pendapatan transfer. Jumlah pendapatan transfer pada tahun 2016 sebesar Rp1.845.437.048.941,00 tahun 2017 turun sebesar Rp1.759.224.311.168,00 dan kembali naik pada tahun 2018 sebesar Rp1.862.466.562.171,00.

Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan persentase rasio kemandirian keuangan tiap tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun anggaran 2016 dimana persentasenya

adalah 21,86% yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 24,40% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 23,44%. Trend rasio kemandirian keuangan yang fluktuatif tersebut disebabkan oleh pendapatan transfer yang juga fluktuatif setiap tahunnya. Pemerintah daerah kabupaten Lamongan tahun 2016 menerima pendapatan transfer sebesar Rp1.845.437.048.941,00 kemudian turun pada tahun 2017 sebesar Rp1.759.224.311.168,00 dan kembali naik pada tahun 2018 sebesar Rp1.862.466.562.171,00.

Tabel 7. Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	$4=2/3*100$
2016	403.474.462.147,33	397.520.914.287,68	101,50
2017	429.200.063.876,82	436.519.037.265,60	98,32
2018	436.595.179.671,02	495.857.330.740,00	88,05
Rata-rata	1.269.269.705.695,17	1.329.897.282.293,28	95,44

Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019

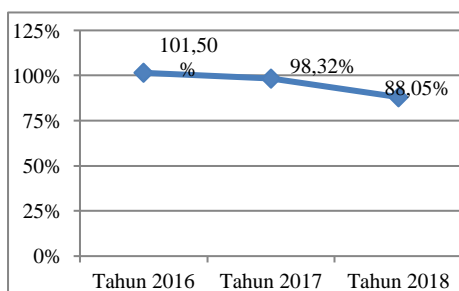
Perhitungan rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018.

Berdasarkan Tabel diatas, maka dapat dilihat rata-rata rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Lamongan

tahun anggaran 2016-2018 adalah sebesar 95,44% yaitu <1 atau 100, sehingga dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dikategorikan **belum efektif** dalam merealisasikan target penerimaan PAD (Mahmudi, 2007: 129).

Pemerintah kabupaten Lamongan pada tahun 2016 berhasil merealisasikan PAD sebesar Rp403.474.462.147,33 dari target anggaran sebesar Rp397.520.914.287,68 atau 101,50%. Sementara pada tahun 2017 PAD yang terealisasi sebesar Rp429.200.063.876,82 dari target anggaran Rp436.519.037.265,60 atau 98,32%. Dan pada tahun 2018 PAD terealisasi sebesar Rp436.595.179.671,02 dari target anggaran Rp495.857.330.740,00 atau 88,05%.

Grafik rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 mengalami trend menurun tiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2016 dimana persentasenya adalah 101,50% turun pada tahun 2017 menjadi 98,32% dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 88,05%.

Trend penurunan rasio efektivitas PAD pada tahun anggaran 2016-2018 disebabkan karena menurunnya kemampuan Kabupaten Lamongan merealisasikan PAD dari target anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Rasio Efisiensi PAD

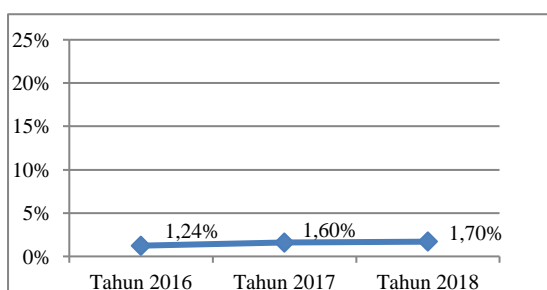
Tahun	Biaya untuk memungut PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3*100
2016	4.989.050.722,00	403.474.462.147,33	1,24
2017	6.882.455.343,00	429.200.063.876,82	1,60
2018	7.415.562.909,00	436.595.179.671,02	1,70
Rata-rata	19.287.068.974,00	1.269.269.705.695,17	1,52

Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019.

Rata-rata rasio efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 sebesar 1,52%. Ini menggambarkan kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan didalam memungut PAD (dalam hal ini Pajak dan retribusi daerah) sudah *efisien* yang ditandai dengan *trend* rasio yang kurang dari 100% (Mahmudi, 2007: 129).

Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat memungut PAD dengan hasil yang optimal atau efektif.

Grafik rasio efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 sebagai berikut:



Gambar 5. Grafik Rasio Efisiensi PAD

Trend rasio efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 menunjukkan persentase rasio efisiensi PAD tiap tahun mengalami penurunan. Dimulai dari tahun anggaran 2016 dimana persentasenya mencapai 1,24% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1,60% dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 1,70%.

Tabel 9. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Target	Rasio (%)
	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	
1	2	3	4=2/3*100
2016	114.982.290.275,30	110.226.338.000,00	104,31
2017	142.025.801.530,00	137.746.655.660,00	103,11
2018	129.214.808.181,09	152.452.312.000,00	84,76
Rata-rata	386.222.899.986,39	400.425.305.660,00	96,45

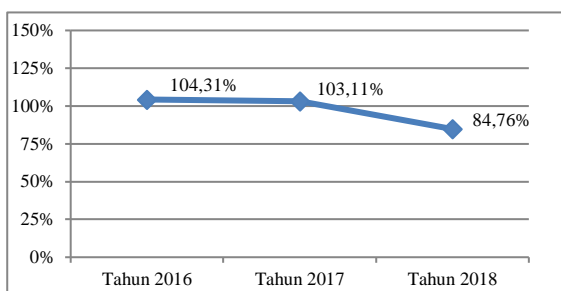
Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019.

Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki nilai rasio rata-rata sebesar 96,45% sehingga dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dikategorikan **belum efektif** dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah (Mahmudi, 2007: 129).

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil merealisasikan penerimaan pajak daerah sebesar Rp114.982.290.275,30 dari target anggaran sebesar Rp110.226.338.000,00, pada tahun 2017 sebesar Rp142.025.801.530,00 dari target anggaran sebesar Rp137.746.655.660,00, dan pada tahun 2018 sebesar Rp129.214.808.181,09 dari target anggaran sebesar Rp152.452.312.000,00.

Grafik rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 sebagai berikut:



Gambar 6. Grafik Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Trend rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 – 2018 mengalami penurunan. Dimulai dari tahun anggaran 2016 dimana persentasenya adalah 104,31% yang kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 103,11% dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 84,76%.

Tabel 10. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

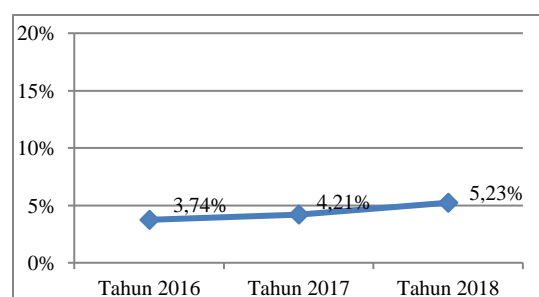
Tahun	Biaya untuk memungut Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} * 100$
2016	4.295.713.309,00	114.982.290.275,30	3,74
2017	5.974.646.875,00	142.025.801.530,00	4,21
2018	6.753.887.498,00	129.214.808.181,09	5,23
Rata-rata	17.024.247.682,00	386.222.899.986,39	4,41

Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lamongan meralisasikan biaya untuk memungut pajak daerah

sebesar Rp4.295.713.309,00, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp5.974.646.875,00, dan pada tahun 2018 sebesar Rp6.753.887.498,00. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah selama tahun 2016-2018 adalah Rp17.024.247.682,00 atau sebesar 4,41%. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan didalam memungut pajak daerah dapat dikategorikan *efisien* yang ditandai dengan trend rasio yang kurang dari 100% (Mahmudi, 2007: 130). Artinya dengan mengeluarkan biaya yang sedikit, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merealisasikan target penerimaan pajak daerah.

Grafik rasio efisiensi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 sebagai berikut:



Gambar 7. Grafik Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari tahun anggaran 2016 dimana persentasenya rasio efisiensi Pajak daerah mencapai 3,74% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 4,21% dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 5,23%.

Tabel 11. Rasio Efisiensi Belanja

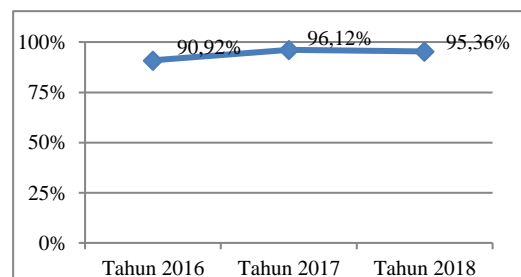
Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	$4=2/3*100$
2016	2.794.454.037.721,66	3.073.644.592.618,30	90,92
2017	2.727.998.787.835,60	2.838.224.484.716,89	96,12
2018	2.812.188.903.958,02	2.948.874.041.024,51	95,36
Rata-rata	8.334.641.729.515,28	8.860.743.118.359,70	94,06

Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lamongan meralisasikan belanja sebesar 90,92% dari anggaran Rp3.073.644.592.618,30. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 96,12% dari anggaran Rp2.838.224.484.716,89. Dan pada tahun 2018 sebesar 95,36% dari anggaran Rp2.948.874.041.024,51. Rata-rata belanja yang direalisasikan selama tahun 2016-2018 adalah 94,06% dari anggaran Rp8.860.743.118.359,70. Rata-rata rasio efisiensi belanja Pemerintah kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 - 2018 sebesar 94,06%, dengan demikian dapat dikatakan

efisien dalam merealisasikan anggaran belanja (Mahmudi, 2007: 152).

Grafik rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 sebagai berikut:



Gambar 8. Grafik Rasio Efektivitas Belanja Pemerintah

Trend rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 menunjukkan trend fluktuatif. Dimulai dari tahun anggaran 2016 dimana persentasenya mencapai 90,92% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 96,12% dan kembali naik pada tahun 2018 menjadi 95,36%.

Tabel 12. Pertumbuhan Pendapatan

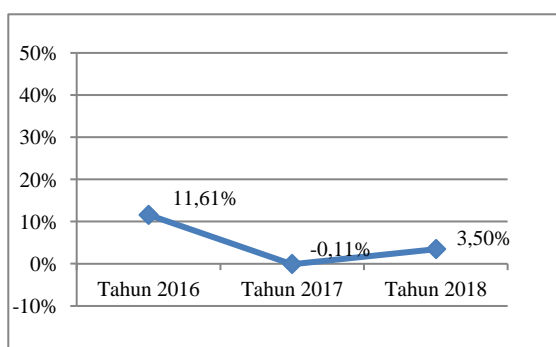
Tahun	Pendapatan Tahun Berjalan – Pendapatan Tahun Sebelumnya (Rp)	Pendapatan Tahun Sebelumnya (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	$4=2/3*100$
2016	282.940.242.489,88	2.436.090.963.266,96	11,61
2017	-2.988.534.712,02	2.719.031.205.756,84	-0,11
2018	95.019.872.288,20	2.716.042.671.044,82	3,50
Rata-rata	374.971.580.066,06	7.871.164.840.068,62	4,76

Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019.

Perhitungan pertumbuhan pendapatan Pemerintah daerah kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 :

Pada tahun 2016 pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan meningkat sebesar Rp282.940.242.489,88 atau 11,61% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp -2.988.534.712,02 atau -0,11%, dan kembali naik pada tahun 2018 sebesar Rp95.019.872.288,20 atau 3,50%. Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2018 adalah sebesar 4,76%

Grafik pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 sebagai berikut:



Gambar 9. Grafik Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah

Trend pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 tergolong

fluktuatif. dimana tahun 2016 tumbuh sebesar 11,61% namun pada tahun 2017 turun menjadi -0,11% kemudian kembali naik pada tahun 2018 sebesar 3,50%.

Penurunan pertumbuhan pendapatan tahun 2017 disebabkan diantaranya karena adanya penurunan dari pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbang (DBH, DAU dan DAK), dimana realisasi penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan hanya mencapai Rp1.594.775.221.094 lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.708.680.363.941.

Tabel 13. Analisis Pertumbuhan Belanja

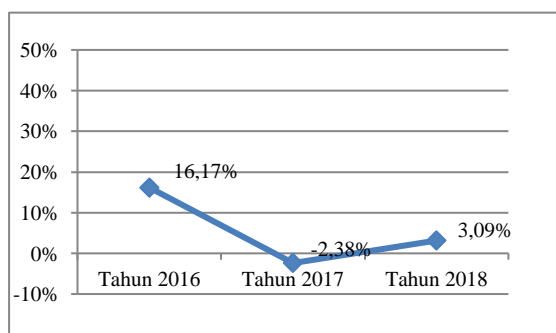
Tahun	Realisasi Belanja Tahun Berjalan – Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	$4=2/3*100$
2016	388.933.992.225,52	2.405.520.045.496,14	16,17
2017	-66.455.249.886,06	2.794.454.037.721,66	-2,38
2018	84.190.116.122,42	2.727.998.787.835,60	3,09
Rata-rata	406.668.858.461,88	7.927.972.871.053,40	5,13

Sumber: BPKAD Kab. Lamongan, 2019.

Pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2007: 146):

Pada tahun 2016 pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan meningkat sebesar Rp 388.933.992.225,52 atau 16,17% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp-66.455.249.886,06 atau -2,38%, dan kembali naik pada tahun 2018 sebesar Rp 84.190.116.122,42 atau 3,09%. Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2018 adalah sebesar 5,13%

Grafik pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 sebagai berikut:



Gambar 10. Grafik Pertumbuhan Belanja Pemerintah

Trend pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 tergolong fluktuatif. dimana tahun 2016 tumbuh sebesar 16,17% namun pada tahun 2017

turun menjadi -2,38% kemudian kembali naik pada tahun 2018 sebesar 3,09%.

Penurunan pertumbuhan belanja tahun 2017 disebabkan karena adanya penurunan belanja modal/pengadaan aset seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Pada tahun 2017 belanja modal pengadaan aset hanya terealisasi sebesar Rp505.221.589.585 lebih kecil dibandingkan dengan belanja modal pengadaan aset pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp616.499.721.973.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tahun anggaran 2016 – 2018 maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 – 2018 memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, itu terbukti dalam merealisasikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta pajak daerah tergolong efisien karena dengan biaya yang relatif sedikit, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat

merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sularso, Sri, 2003. *Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi*. Yogyakarta: BPFE

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

[Http://www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

[Http://www.bpkad.lamongankab.go.id](http://www.bpkad.lamongankab.go.id)

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Bisma dan Susanto, 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mataram*.

Fahmi Irham, 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Halim dan Kusufi, 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi keempat*, Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Nordiawan dan Hertianti, 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi dua*, Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kab Lamongan.

